

Internalisasi Nilai Multikultural Kampung Toleransi Paledang Sebagai Model Pembangunan Perdamaian Dan Benteng Radikalisme

Bethari Ayu Anggraeni¹, Ichsan Malik², Tri Panca Titis Arbiansyah³, Rachmat
Setiawibawa⁴, Arifuddin Uksan⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: bethari.anggraeni@kn.idu.ac.id

Article History:

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 19 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Keywords:

Multikulturalisme, Kampung
Toleransi, Pembangunan
Perdamaian, Ketahanan
Sosial

Abstract: Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya potensi intoleransi dan radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai multikultural di Kampung Toleransi Paledang, Kota Bandung, serta mengkaji perannya sebagai model pembangunan perdamaian dan benteng terhadap radikalisme. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) dari Bennett (1986) untuk memetakan kesadaran keberagaman masyarakat, serta teori peacebuilding (Galtung, 1996; Lederach, 1997) dan social resilience (Adger, 2000) untuk memahami dimensi struktural ketahanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Kampung Paledang telah mencapai tahap adaptation menuju integration dalam kerangka DMIS, yang tercermin melalui praktik sosial lintas agama seperti kerja bakti bersama, perayaan hari besar keagamaan secara inklusif, dan dialog antarumat. Proses ini memperkuat kohesi sosial dan membangun struktur perdamaian berbasis komunitas. Dengan demikian, internalisasi nilai multikultural terbukti berkontribusi dalam membangun ketahanan sosial yang efektif sebagai benteng terhadap penyebaran ideologi radikal di tingkat lokal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural. Berdasarkan Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dari BPS (2024), Indonesia memiliki lebih dari 1.200 kelompok etnis dan 694 bahasa daerah yang tersebar di wilayah Nusantara serta enam agama. Selain enam agama yang lebih dahulu diakui sebagai agama resmi di Indonesia,

terdapat juga pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dicantumkannya kolom kepercayaan dalam KTP Elektronik yang awalnya (-). Walaupun implementasi putusan ini juga mendapatkan protes, namun setidaknya keadaan lebih baik bagi penghayat. Setelah putusan MK muncul peraturan turunan yang menjamin penghayat bisa mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lain seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Register Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak yang pada kolom kepercayaan tertulis kepercayaan, bukan (-). Selain pengakuan terkait administrasi kependudukan, melalui putusan ini, Majelis Hakim juga mengakui hak memeluk dan menjalankan ibadah yang setara antara penghayat kepercayaan dan agama (Viri, K., & Febriany, Z., 2020). Adanya keberagaman ini menjadi kekayaan dan identitas namun juga tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial ditengah kompleksitas isu yang ada di masyarakat. Jika keragaman yang seharusnya menjadi modal sosial tidak disertai penguatan nilai multikultural di tingkat komunitas, hal ini justru dapat berpotensi menimbulkan gesekan. Dalam konteks ini, lemahnya internalisasi nilai kebinekaan menjadi pintu masuk bagi ideologi eksklusif dan radikal. Oleh karena itu, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran yang sangat krusial sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus benteng dalam menghadapi ideologi transnasional yang intoleran. Namun disisi lain, lemahnya internalisasi nilai kebhinekaan di tingkat lokal membuka ruang bagi masuknya radikalisme (BNPT, 2020).

Fenomena radikalisme dan intoleransi sampai saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi perdamaian, baik secara nasional maupun secara global. Gerakan radikal diberbagai negara yang berbasis agama maupun ideologi memicu adanya konflik sosial, kekerasan dan juga disintegrasi. Berdasarkan laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2020-2022 dari Wahid Foundation, Jumlah tindakan pelanggaran KBB mengalami penurunan dari 219 tindakan di tahun 2020 menjadi 170 tindakan di tahun 2021, Namun meskipun begitu, tingkat intoleransi dapat dikategorikan masih tetap tinggi. Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah siar kebencian/*hate speech* yang diikuti pembatasan aktivitas keagamaan dan tuduhan sesat terhadap kelompok tertentu.

Pencegahan radikalisme memerlukan peran komunitas lokal sebagai aktor perdamaian, tidak cukup jika hanya dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya top down. Pendekatan Pembangunan perdamaian akar rumput menekankan bahwa masyarakat lokal memiliki modal sosial, budaya, dan spiritual untuk membangun harmoni (Galtung, 1996). Oleh karenanya, adanya penguatan komunitas menjadi kunci dalam membangun benteng sosial untuk melawan ancaman radikalisme.

Salah satu contoh nyata dari inisiatif akar rumput dalam membangun perdamaian berbasis keberagaman sebagai benteng radikalisme adalah kemunculan Kampung Toleransi Paledang di Kota Bandung. Terletak di RW 02, Gang Ruhana, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, kawasan ini dikenal sebagai wilayah padat penduduk yang dihuni oleh warga dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Di lingkungan ini berdiri berdampingan sebuah masjid, gereja, dan vihara, menjadi simbol nyata keragaman yang menuntut warganya untuk hidup saling menghargai. Dari titik temu inilah tumbuh kesadaran warga untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan sosial, bukan sumber konflik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik toleransi berbasis komunitas, misalnya dalam penelitian Pujawati (2023), nilai-nilai pluralisme agama di Kampung Toleransi Paledang diinternalisasi melalui pembiasaan sehari-hari, seperti saling menyapa, kerja bakti lintas agama, dan perayaan hari besar keagamaan yang dilakukan secara inklusif. Interaksi sosial ini

memperlihatkan bagaimana keberagaman simbol agama tidak menjadi tembok pemisah, melainkan jembatan untuk membangun pengertian bersama. Pendekatan ini sejalan dengan teori interaksionisme simbolik, di mana makna-makna yang melekat pada simbol agama terbentuk melalui proses sosial dan saling negosiasi dalam komunitas. Kemudian dalam penelitian etnografis Gunawan (2023) menggarisbawahi bagaimana komunikasi lintas iman Dimana tokoh agama memiliki peran sentral dalam membangun dialog yang inklusif melalui forum komunikasi informal dan juga kegiatan sosial, hal ini telah menjadi bagian dari praktik kehidupan warga Paledang. Selanjutnya dalam penelitian Dermawan & Hamidah (2023) menyatakan bahwa tokoh-tokoh keagamaan di Paledang menerapkan strategi komunikasi persuasif sebagai salah satu Upaya internalisasi nilai toleransi, dengan mengedepankan Bahasa yang merangkul dan simbol-simbol identitas bersama. Kegiatan lintas agama seperti doa bersama ketika terjadi bencana atau kegiatan sosial yang mengedepankan gotong royong antar warga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai multikultural secara alami. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi di tingkat nasional belum sepenuhnya efektif tanpa partisipasi masyarakat lokal. Karena itu, inisiatif berbasis komunitas seperti Kampung Toleransi menjadi penting untuk memperkuat ketahanan sosial dan memperkecil potensi infiltrasi ideologi intoleran.

LANDASAN TEORI

Dalam masyarakat multikultural, proses internalisasi nilai keberagaman dan toleransi menjadi pilar penting dalam membangun perdamaian sosial. Nilai multikultural tidak hanya dipahami sebagai pengakuan atas perbedaan budaya, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang mendorong terbentuknya kesadaran dan kepekaan antarbudaya. Multikulturalisme merupakan pandangan hidup yang menekankan pada perbedaan, kesetaraan dan hal untuk diakui dalam keberagaman. Perspektif ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dengan lebih dari seribu kelompok etnis dan berbagai keyakinan. Dalam hal ini, internalisasi nilai multikultural menjadi sarana yang tepat dan strategis guna memperkuat kohesi dan harmoni sosial serta mencegah berkembangnya paham radikalisme yang seringkali berakar dari sikap eksklusif dan intoleran.

Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) Milton J. Bennett

Proses internalisasi nilai multikultural dapat dijelaskan melalui Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) yang dikembangkan oleh Milton J. Bennett (1986). Model ini menggambarkan perjalanan perkembangan kesadaran seseorang terhadap keberagaman budaya dalam enam tahapan, yaitu *denial*, *defense*, *minimization*, *acceptance*, *adaptation*, dan *integration*. Setiap tahapan merepresentasikan pergeseran cara pandang individu atau kelompok terhadap keberagaman budaya, dari perspektif etnosentris menuju etnorelativis.

Dalam penelitian ini, kerangka DMIS digunakan untuk menilai implementasi program Kampung Toleransi Paledang dengan cara memetakan sikap, persepsi, serta praktik sosial warga ke dalam tahapan-tahapan tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi posisi komunitas lokal dalam spektrum kesadaran keberagaman, sekaligus melihat hambatan, potensi, serta peluang dalam proses internalisasi nilai multikultural. Kerangka analisis ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas program Kampung Toleransi sebagai model pembangunan perdamaian berbasis komunitas lokal. Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mendalam mengenai praktik internalisasi nilai multikultural, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam upaya

pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Teori pembangunan perdamaian Johan Galtung & John Paul Lederach

Teori pembangunan perdamaian yang dikembangkan oleh Johan Galtung (1996) memberikan dasar konseptual untuk memahami hubungan antara kesadaran multikultural dan perdamaian sosial. Galtung membedakan antara negative peace (ketiadaan kekerasan langsung) dan positive peace (terbangunnya struktur sosial yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi). Dalam kerangka positive peace, perdamaian lebih dari sekadar tidak adanya konflik; melainkan suatu kondisi sosial yang memungkinkan semua kelompok hidup bersama dalam rasa aman dan saling menghormati. Kesadaran multikultural, dalam konteks ini, menjadi elemen penting dalam menciptakan struktur sosial damai yang berkelanjutan. Selain itu, John Paul Lederach (1997) menekankan pentingnya pembangunan perdamaian berbasis masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai lokal dan praktik sosial warga. Pendekatan ini relevan untuk Kampung Toleransi Paledang, yang menjadikan solidaritas, gotong royong, dan nilai-nilai budaya sebagai sarana membangun hubungan harmonis antaragama.

Dengan demikian, DMIS dan teori pembangunan perdamaian bisa digabungkan untuk menjelaskan dua aspek utama dari proses internalisasi nilai multikultural: yang pertama adalah transformasi kesadaran individu dan komunitas terhadap keberagaman (aspek psikososial); yang kedua adalah penciptaan struktur sosial yang mendukung kehidupan damai (aspek struktural). Ketika warga komunitas mencapai tahap integrasi dalam DMIS, mereka telah memiliki apa yang disebut Galtung sebagai *cultural peace* yaitu kondisi di mana budaya damai tertanam dalam sistem nilai dan perilaku sosial masyarakat.

Teori ketahanan sosial (*sosial resilience*) Adger & Ungar

Selain itu, konsep ketahanan sosial (*sosial resilience*) menjelaskan bagaimana kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi dan pulih dari berbagai macam tekanan sosial, termasuk ancaman ideologi radikal (Adger, 2000). Menurut Ungar (2011) masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran multikultural tinggi biasanya memiliki kohesi sosial yang kuat, yang ditandai dengan kepercayaan, solidaritas, dan komunikasi lintas kelompok yang efektif. Kondisi ini menjadikan mereka akan lebih tahan terhadap infiltrasi ideologi intoleran, ujaran kebencian, maupun provokasi berbasis identitas. Dalam konteks Kampung Toleransi Paledang, nilai gotong royong, keterbukaan antarwarga, dan kebiasaan merayakan perbedaan bersama menjadi bentuk nyata dari ketahanan sosial-budaya yang tumbuh dari internalisasi nilai multikultural.

Keterpaduan antara DMIS, *peacebuilding*, dan *sosial resilience* membentuk suatu kerangka teoritis yang komprehensif untuk memahami bagaimana internalisasi nilai multikultural dapat berfungsi sebagai strategi *peacebuilding* sekaligus sebagai benteng dari radikalisme. Proses internalisasi nilai multikultural, sebagaimana dijelaskan oleh DMIS, membentuk kesadaran keberagaman yang adaptif. Kesadaran ini kemudian melahirkan struktur sosial yang damai sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Galtung dan Lederach, yang dalam jangka panjang menciptakan ketahanan sosial terhadap ancaman ideologi radikal. Dengan demikian, Kampung Toleransi Paledang tidak hanya dapat dilihat sebagai representasi praktik sosial multikultural, tetapi juga sebagai model pembangunan perdamaian berbasis komunitas yang berfungsi menjaga kohesi sosial, memperkuat identitas nasional dan benteng terhadap radikalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diangkat bersifat holistik, kompleks, dan penuh makna, sehingga tidak dapat dijangkau atau diukur secara memadai melalui metode kuantitatif. Penelitian kualitatif dipandang relevan untuk mengungkap makna di balik fenomena sosial, khususnya dalam konteks interaksi sosial lintas budaya yang sarat dengan nilai, persepsi, dan pengalaman subjektif. Creswell (1994) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Sementara Yusuf (2016) menegaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini secara khusus menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai praktik internalisasi nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Toleransi Paledang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara rinci bagaimana nilai-nilai multikultural dipahami, dijalankan, serta diintegrasikan ke dalam pola relasi sosial masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada deskripsi fenomena sosial, bukan sekadar pengujian hipotesis, melainkan pemahaman makna yang terlibat di dalam proses interaksi sosial.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi Lapangan, dilakukan secara langsung di Kampung Toleransi Paledang untuk mengamati pola interaksi sosial antarwarga, dinamika hubungan lintas agama, serta pelaksanaan kegiatan komunal yang mencerminkan nilai multikultural. Observasi ini bertujuan menangkap realitas sosial secara alami serta mengidentifikasi ekspresi perilaku yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara.
2. Wawancara Semi-Terstruktur, dilaksanakan terhadap tokoh-tokoh lokal, seperti pengurus kampung toleransi, tokoh agama, dan beberapa warga yang berasal dari latar belakang agama dan budaya berbeda. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, nilai-nilai, serta makna yang dilekatkan informan pada fenomena keberagaman di lingkungan mereka, sambil memberikan ruang fleksibilitas untuk mengeksplorasi tema-tema baru yang muncul dalam percakapan.
3. Studi Dokumentasi, berupa pengumpulan dan telaah dokumen-dokumen yang terkait dengan Kampung Toleransi Paledang, seperti arsip kegiatan, laporan komunitas, berita media lokal, foto-foto kegiatan lintas agama, serta kebijakan pemerintah daerah. Studi dokumentasi ini berguna untuk memperkaya data lapangan dan memberikan konteks historis maupun sosial terhadap fenomena yang diteliti.

Metode triangulasi diterapkan untuk memastikan keabsahan data, yaitu dengan membandingkan temuan dari ketiga teknik pengumpulan data di atas sehingga diperoleh gambaran yang valid dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Bennett sebagai Alat Analisis

1. Penjabaran enam tahapan kesadaran keberagaman (menghindar, bertahan, mengurangi perbedaan, penerimaan, adaptasi, integrasi).

Milton J. Bennett (1993) mengembangkan Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) sebagai kerangka untuk memahami bagaimana individu berkembang dari orientasi etnosentris menuju etnorelativis dalam menyikapi perbedaan budaya. Model ini tidak hanya memetakan sikap, tetapi juga menjelaskan transformasi psikologis yang mendasari kemampuan seseorang dalam berinteraksi lintas budaya.

Tahap pertama, yakni Denial (Menghindar), muncul ketika individu belum menyadari keberadaan perbedaan budaya. Orang pada tahap ini biasanya hidup dalam lingkungan yang homogen dan menganggap budaya lain tidak relevan atau bahkan tidak ada. Misalnya, individu yang belum pernah bersinggungan dengan budaya asing kerap memandang nilai budaya lain sebagai sesuatu yang tidak perlu diketahui.

Memasuki tahap Defense (Bertahan), individu mulai mengenali adanya perbedaan budaya, tetapi memandangnya sebagai ancaman. Sikap defensif ini tampak dalam bentuk pembelaan berlebihan terhadap budaya sendiri, serta kecenderungan menganggap budaya lain lebih rendah, salah, atau bahkan berbahaya. Bias stereotip dan rasa superioritas budaya kerap muncul pada fase ini.

Pada tahap Minimization (Mengurangi Perbedaan), individu mulai mengakui adanya perbedaan budaya, tetapi menganggap perbedaan itu tidak signifikan. Mereka lebih menekankan kesamaan universal antar manusia, seperti keyakinan bahwa “kita semua sama,” sehingga cenderung mengabaikan keragaman nilai, norma, dan perilaku budaya yang bersifat unik.

Beranjak ke tahap Acceptance (Penerimaan), individu mulai memahami bahwa perbedaan budaya bersifat sah dan kompleks. Meskipun tidak selalu menyetujui nilai-nilai budaya lain, mereka menyadari bahwa perspektif yang berbeda memiliki validitas dan pantas dihormati. Kesadaran ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya interaksi lintas budaya yang lebih inklusif.

Tahap Adaptation (Adaptasi) mencerminkan kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku, gaya komunikasi, dan perspektifnya agar sesuai dengan budaya lain. Empati dan kepekaan budaya menjadi ciri utama fase ini, di mana individu menginternalisasi keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi interaksi antarbudaya.

Pada puncak model, yakni tahap Integration (Integrasi), individu mampu menggabungkan pengalaman budaya yang berbeda ke dalam identitas dirinya. Mereka dapat berpindah perspektif budaya dengan fleksibel dan melihat keberagaman sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Individu di tahap ini kerap berperan sebagai mediator budaya yang menjembatani perbedaan dalam interaksi lintas budaya.

Secara garis besar, tiga tahap awal DMIS (Denial, Defense, Minimization) termasuk dalam orientasi etnosentris, yakni ketika budaya sendiri dianggap sebagai pusat segalanya. Sementara tiga tahap terakhir (Acceptance, Adaptation, Integration) mewakili orientasi etnorelativis, di mana individu mulai memandang budaya sendiri dalam konteks budaya lain dan memahami bahwa perbedaan merupakan realitas yang wajar dan penting (Bennett, 1993).

2. Relevansi Teori DMIS dalam Menilai Transformasi Nilai dan Sikap Multikultural di Komunitas Lokal

Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) yang dikembangkan oleh Milton J. Bennett menjadi salah satu kerangka teoretis yang sangat relevan dalam menilai proses transformasi nilai dan sikap multikultural di komunitas lokal (Bennett, 1993). Model ini tidak hanya menjelaskan tahapan kesadaran individu terhadap perbedaan budaya, tetapi juga menjadi alat analisis praktis yang membantu peneliti atau fasilitator memetakan dinamika interkultural dalam masyarakat (Zahri, 2023).

Pertama, DMIS memberikan sarana memetakan perkembangan sikap individu atau kelompok terhadap keberagaman. Dengan enam tahap yang jelas, mulai dari penolakan (denial) hingga integrasi, model ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi posisi komunitas dalam spektrum kesadaran keberagaman. Hal ini sangat penting, sebab upaya membangun masyarakat multikultural perlu mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosiokultural individu atau kelompok yang terlibat (Bennett, 1993).

Kedua, DMIS membantu mengidentifikasi hambatan dan potensi dalam transformasi sikap multikultural. Misalnya, tahap defense atau minimization sering menjadi hambatan karena individu merasa terancam atau menganggap perbedaan tidak penting, sehingga menghambat penerimaan keberagaman. Sebaliknya, tahap adaptation dan integration menjadi potensi besar karena menunjukkan kesiapan individu untuk berinteraksi lintas budaya secara efektif (Zahri, 2023).

Ketiga, DMIS menjadi dasar dalam mengembangkan intervensi yang sesuai. Setiap tahap dalam model ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Pada tahap denial, misalnya, intervensi lebih menitikberatkan pada edukasi dasar mengenai keberagaman, sementara pada tahap adaptation, pelatihan empati, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan pembentukan perspektif etnorelativis menjadi lebih penting (Bennett, 1993).

Keempat, DMIS dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program multikultural. Model ini menjadi indikator praktis untuk menilai perubahan sikap dan perilaku anggota komunitas sebelum dan sesudah pelaksanaan program multikultural. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dalam melihat sejauh mana transformasi nilai terjadi dalam komunitas lokal (Bennett, 1993).

Kelima, pemahaman dan penerapan DMIS juga mendukung transformasi nilai dalam komunitas lokal. Ketika komunitas berhasil mencapai tahap integrasi, keberagaman tidak hanya diterima, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kolektif. Hal ini menunjukkan perubahan mendasar dalam nilai-nilai sosial, di mana keragaman budaya dianggap sebagai aset dan bukan ancaman (Zahri, 2023). Dengan demikian, teori Bennett bukan hanya kerangka konseptual, tetapi juga alat praktis yang dapat membantu komunitas lokal bergerak secara bertahap dan terukur menuju masyarakat yang lebih inklusif dan multikultural.

Teori Peacebuilding Johan Galtung dan John Paul Lederach: Membangun Perdamaian Positif

Galtung (1996) menekankan pentingnya perdamaian positif dalam kerangka teori Pembangunan perdamaian, yakni dimana damai tidak hanya diartikan sebagai kondisi yang terbebas dari kekerasan, tetapi juga adanya struktur sosial yang adil, saling percaya dan non-diskriminatif. Lederach (1997) menambahkan bahwa pembangunan perdamaian yang berkelanjutan harus berakar dari nilai lokal dan relasi sosial masyarakat, yang artinya pembangunan perdamaian harus berasal dari masyarakat lokal (*bottom-up*) dan berakar pada nilai-nilai budaya mereka sendiri.

Kampung Toleransi Paledang merupakan contoh nyata praktik Pembangunan perdamaian dari akar rumput. di Kampung Paledang perdamaian dibangun melalui kehidupan sehari-hari, seperti; kebiasaan gotong-royong, solidaritas lintas agama, dan forum dialog informal antarwarga. Masyarakat tidak menunggu kebijakan dari atas yang bersifat *top-down*, tetapi mereka membangun perdamaian dari bawah (*bottom-up*). Pola interaksi ini menunjukkan adanya *structural peace*, kondisi di mana hubungan sosial didasarkan pada keadilan, saling menghormati,

dan kesetaraan. Dengan ini, proses internalisasi nilai multikultural di Kampung Paledang berfungsi sebagai faktor pembentuk struktur perdamaian yang terinstitusionalisasi kedalam budaya lokal, bukan hanya berfungsi sebagai sikap sosial, sebagaimana hal yang dimaksud sebagai *cultural peace* oleh Galtung.

Dalam konteks Kampung Toleransi Paledang, prinsip-prinsip perdamaian terwujud nyata melalui kehidupan sosial warga yang dibangun atas dasar gotong royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap keragaman agama. Di daerah ini, berdiri masjid, gereja, dan vihara secara berdampingan simbol nyata dari perdamaian positif yang menegaskan kohabitasi damai tanpa dominasi atau eksklusif. Kegiatan seperti kerja bakti lintas iman, pengajian dan misa yang menghormati waktu ibadah, serta perayaan hari besar keagamaan bersama menjadi praktik budaya perdamaian, yaitu perdamaian yang berakar dalam budaya sehari-hari (Galtung, 1996). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Paledang telah membangun perdamaian secara struktural dan kultural tanpa menunggu intervensi dari negara. Dari sudut pandang teori Bennett (DMIS), praktik pembangunan perdamaian di Paledang mencerminkan masyarakat yang telah mencapai tahap adaptasi menuju integrasi. Kesadaran mereka akan keberagaman tidak berhenti pada toleransi pasif, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari identitas sosial bersama. Dengan demikian, pembangunan perdamaian di Paledang bukan semata-mata hasil kebijakan resmi, tetapi wujud nyata dari transformasi kesadaran antarbudaya yang menanam di tingkat komunitas. Lebih jauh, pendekatan pembangunan perdamaian di Paledang juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap radikalisme. Ketika ruang dialog dan kepercayaan antaragama terbuka luas, potensi infiltrasi ideologi intoleran dapat ditekan. Masyarakat memiliki apa yang disebut Lederach sebagai imajinasi moral, kemampuan untuk melihat perbedaan sebagai peluang kolaborasi, bukan ancaman konflik. Dengan demikian, Kampung Toleransi Paledang dapat dipandang sebagai contoh infrastruktur perdamaian lokal, yaitu jaringan sosial yang menopang perdamaian dari bawah.

Teori Social Resilience (Adger & Ungar): Ketahanan Sosial terhadap Radikalisme

Kemampuan komunitas untuk bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan sosial, termasuk ancaman ideologi radikal, adalah fokus dari konsep ketahanan sosial, menurut Adger (2000) dan Ungar (2011). Ketahanan sosial Paledang dibangun melalui jejaring sosial yang kuat, nilai solidaritas, dan komunikasi lintas agama yang kuat. Melalui interaksi sehari-hari, orang dapat bekerja sama untuk mengelola perbedaan dan mengurangi kemungkinan konflik. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tahan sosial tidak hanya bergantung pada sumber daya material; kekuatan modal sosial dan budaya juga penting. Masyarakat yang memiliki kesadaran multikultural lebih tahan terhadap perubahan dan lebih tahan terhadap ideologi yang tidak toleran. Dengan kata lain, tingkat kesadaran antarbudaya suatu komunitas (menurut DMIS) berkorelasi positif dengan tingkat ketahanan sosialnya terhadap ancaman disintegratif.

Kampung Toleransi Paledang menunjukkan sifat ketahanan sosial yang tinggi. Pertama, interaksi sehari-hari lintas agama dan kolaborasi dalam kegiatan warga membentuk kohesi sosial di daerah ini. Nilai gotong royong dan solidaritas menjembatani perbedaan keyakinan. Kedua, terdapat kapasitas adaptif, di mana masyarakat dapat menyesuaikan tradisi sosial mereka dengan konteks keberagaman, misalnya dengan saling menghormati waktu ibadah atau menyesuaikan perayaan agar inklusif bagi semua. Ketiga, kepercayaan sosial juga dikenal sebagai kepercayaan sosial kuat di antara warga dan pemuka agama. Ini mencegah konflik atau provokasi berbasis identitas sejak awal. Menurut DMIS Bennett, ketahanan sosial ini meningkat seiring dengan

peningkatan kesadaran budaya masyarakat saat menuju fase integrasi. Setelah mencapai tahap ini, masyarakat mulai memahami perbedaan dan menjadikannya bagian dari sistem sosial mereka. Kemampuan untuk beradaptasi sosial diperkuat oleh kesadaran etnorelativis, yang juga mengurangi kerentanan terhadap propaganda intoleran. Oleh karena itu, daya tahan sosial Paledang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif; melalui penerapan nilai yang inklusif, ia menciptakan pertahanan anti radikalisme.

Kondisi sosiologis ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial Paledang terbentuk melalui proses internalisasi nilai multikultural yang terus-menerus, bukan secara instan. Praktik kolaborasi lintas agama menghasilkan identitas kolektif baru: menjadi "warga Paledang" lebih penting daripada identitas agama tertentu. Identitas komunal seperti ini membantu mempertahankan stabilitas sosial di tengah polarisasi berbasis agama yang semakin meningkat.

Keterkaitan Teori Peacebuilding dan Social Resilience dengan Model DMIS dalam Konteks Kampung Toleransi Paledang

Proses internalisasi nilai multikultural di Kampung Toleransi Paledang tidak hanya menunjukkan transformasi kesadaran antarbudaya seperti yang dijelaskan Bennett (1993), tetapi juga mencerminkan praktik pembangunan perdamaian berbasis komunitas menurut Galtung (1996) dan Lederach (1997). Dalam teori pembangunan perdamaian, perdamaian positif dicapai melalui penguatan struktur sosial yang adil, inklusif, dan didasarkan pada kepercayaan antar kelompok. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam praktik sosial warga Paledang yang menganggap keberagaman sebagai kekuatan kolektif untuk menciptakan harmoni.

Jika dipetakan dalam kerangka DMIS, masyarakat Paledang berada pada tahap *adaptation* hingga *integration*. Hal ini terlihat dari kemampuan warga menyesuaikan diri dengan tradisi dan keyakinan berbeda, seperti kerja bakti lintas agama, perayaan hari besar bersama, dan komunikasi terbuka antar umat beragama. Masyarakat tidak lagi sekadar mentoleransi perbedaan, tetapi sudah mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ini menunjukkan terbentuknya budaya damai yang terinternalisasi dalam perilaku sosial, dikenal sebagai *cultural peace* (Galtung, 1996).

Selain itu, keberhasilan komunitas ini dalam mempertahankan harmoni antar umat beragama menunjukkan adanya ketahanan sosial yang kuat. Kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan sosial, termasuk ancaman ideologi radikal, dikenal sebagai ketahanan sosial, (Adger, 2000). Kebiasaan gotong royong dan komunikasi intensif warga Paledang memperkuat solidaritas sosial. Ungar (2011) menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran multikultural yang tinggi lebih tahan terhadap provokasi dan disinformasi yang berbasis identitas. Ini sejalan dengan tahap etnorelativisme Bennett di mana masyarakat telah mengembangkan perspektif inklusif yang melihat keberagaman sebagai sumber daya sosial daripada ancaman.

Kombinasi antara kesadaran antarbudaya (DMIS), *peacebuilding*, dan *social resilience* membentuk suatu siklus penguatan sosial yang berkelanjutan. Kesadaran antarbudaya dapat mendorong aspek psikososial; empati dan penerimaan. Kemudian *peacebuilding* dapat memperkuat aspek struktural; struktur sosial yang adil dan kooperatif. Sementara *social resilience* yang merupakan aspek adaptif untuk menjaga stabilitas masyarakat terhadap potensi disintegrasi. Dengan demikian, Kampung Toleransi Paledang dapat dipahami bukan hanya sebagai simbol toleransi, tetapi juga sebagai model *grassroots peacebuilding* yang menumbuhkan *resilient community* yang mampu menginternalisasi nilai damai, membentengi diri dari ideologi radikal, dan menjaga keberlanjutan kohesi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Toleransi Paledang merupakan model nyata dari praktik pembangunan perdamaian berbasis komunitas (*grassroots peacebuilding*) yang didasarkan pada nilai-nilai multikultural dan gotong royong. Internalisasi nilai multikultural ini meningkatkan kesadaran individu maupun kelompok masyarakat tentang keberagaman hingga pada akhirnya dapat memperkuat struktur sosial yang inklusif. menurut Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS), masyarakat Paledang berada di tahap adaptasi menuju integrasi, dimana perbedaan agama dan budaya tidak lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi menjadi bagian dari identitas kolektif warga. Menurut teori pembangunan perdamaian Johan Galtung dan John Paul Lederach, praktik sosial di Paledang menunjukkan perdamaian positif yang berkembang dari bawah ke atas melalui kegiatan lintas agama, solidaritas sosial, dan komunikasi terbuka antarwarga.

Sementara itu, berdasarkan teori ketahanan sosial (*sosial resilience*) yang dikembangkan oleh Adger dan Ungar menunjukkan bahwa masyarakat Paledang memiliki Tingkat *sosial resilience* yang tinggi terhadap ancaman radikalisme. Ketangguhan komunitas ini dalam menghadapi disinformasi dan provokasi yang berbasis identitas didapat dari adanya kohesi sosial, kepercayaan antarwarga, dan nilai solidaritas. Adanya kesadaran multikultural yang tumbuh dalam komunitas menjadi benteng yang adaptif dalam menjaga masyarakat dari infiltrasi ideologi intoleran.

Keterpaduan antara DMIS, peacebuilding, dan social resilience secara konseptual membentuk siklus sosial yang saling memperkuat kesadaran antarbudaya yang kemudian melahirkan struktur perdamaian yang adil dan inklusif, sementara itu struktur perdamaian tersebut memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman radikalisme. Dengan demikian Kampung Toleransi Paledang dapat dilihat sebagai model internalisasi nilai multikultural yang efektif dalam membangun perdamaian positif dan memperkuat ketahanan sosial bangsa.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas model serupa ke wilayah lain dengan memperhatikan konteks sosial-budaya lokal. Pendekatan berbasis komunitas yang menumbuhkan kesadaran antarbudaya terbukti lebih berkelanjutan dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2020). *Strategi nasional pencegahan paham radikalisme yang mengarah pada terorisme*. Jakarta: BNPT.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil suku dan keragaman bahasa daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- Bennett, M. J. (1986). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. *International Journal of Intercultural Relations*, 10(2), 179–196.
- Bennett, M. J. (1993). *Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity*. In R. M. Paige (Ed.), *Education for the intercultural experience* (pp. 21–71). Intercultural Press.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. Thousand

- Oaks, CA: Sage Publications.
- Dermawan, A., & Hamidah, N. (2023). Konstruksi kesadaran toleransi dalam komunitas multikultural. *Jurnal Harmoni Sosial*, 8(1), 45–59.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. London: Sage Publications.
- Gunawan, T. (2023). Multikulturalisme dan identitas nasional di era digital. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 9(2), 88–102.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Kolom Kepercayaan dalam KTP Elektronik*. Jakarta: MKRI.
- Pujawati, I. (2023). Kampung Toleransi Paledang sebagai representasi nilai multikultural dalam masyarakat urban. *Jurnal Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora*, 21(1), 119–134. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- Wahid Foundation. (2022). *Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2020–2022*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Ungar, M. (2011). The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. *American Journal of Orthopsychiatry*, 81(1), 1–17.
- Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zahri, M. (2023). Transformasi nilai toleransi di masyarakat majemuk: Perspektif DMIS Bennett. *Jurnal Komunikasi Lintas Budaya*, 5(2), 112–126.